

Perempuan dan Politik (Study tentang keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang)

Author:

Eni Nur Wahyuni

Afiliation:STKIP Muhammadiyah
Lumajang**Corresponding email**

author email

Histori Naskah:

Submit: 99-00-9999

Accepted: 99-00-9999

Published: 99-00-9999



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Dalam kebudayaan bermasyarakat, kita menjumpai berbagai pernyataan yang menyatakan persamaan manusia. Namun, dalam kenyataan sehari-hari kita mengalami adanya ketidaksamaan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan-perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kesetaraan gender muncul dari berbagai anggapan masyarakat tentang pembagian peranan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran perempuan terhadap politik di Kabupaten Lumajang. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Keterlibatan perempuan di dunia politik masih menghadapi banyak hambatan dalam dunia politik. Walaupun sudah ada banyak kemajuan dan perubahan positif dalam beberapa dekade terakhir, namun perempuan masih kurang diwakilkan dalam posisi-posisi politik dan terkadang mengalami diskriminasi dan seksisme dalam lingkungan politik.

Kata kunci: Politik, Wanita, Lumajang.

Pendahuluan

Politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan. Kegiatan Politik diusahakan untuk mencapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, maka kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan Bersama (Paramitha, 2017: 1). Pandangan lain menurut Bedjo Sukarno (2016: 4) mendefinisikan bahwa politik ialah merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga

negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Dimana melalui kegiatan politik tersebut diharapkan mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi kepentingan Bersama.

Dalam kebudayaan bermasyarakat, kita menjumpai berbagai pernyataan yang menyatakan persamaan manusia. Namun, dalam kenyataan sehari-hari kita mengalami adanya ketidaksamaan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan-perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya, atau yang bisa disebut dengan Startifikasi social (social startification). Startifikasi jenis kelamin didasarkan pada factor perolehan, yakni laki-laki dan perempuan.

Dalam masyarakat masih terdapat perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan masyarakat, tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga, sehingga terjadi ketidaksamaan pada strata social. Pada berbagai sudut pandang, perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki, tidak terkecuali pada bidang politik. Gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan (Abdullah, 2004 : 11).

Kesetaraan gender muncul dari berbagai anggapan masyarakat tentang pembagian peranan antara laki-laki dan perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan itu hanya bertugas mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki yang bertanggungjawab mencari nafkah mengakibatkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Misalnya perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena nanti hanya akan mengurus rumah tangga di rumah. Hal ini dapat mengakibatkan laki-laki memiliki ruang gerak lebih luas di dalam ruang publik dibanding dengan kaum perempuan. Meskipun saat ini anggapan tersebut sudah mulai luntur, tetapi masih ada stereotip yang menganggap perempuan tidak perlu banyak tampil di sektor publik, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa yang selalu tampil di sektor publik terutama masalah politik sebagian besar didominasi oleh laki-laki.

Politik memberikan kontribusi dalam membentuk dan mengembangkan asumsi dan harapan seseorang tentang anggapan apa yang dapat diterima atau layak secara politik (Glasberg & Shannon, 2011: 51). Istilah pendidikan politik digunakan untuk beberapa program studi sosial di sekolah yang memiliki tujuan dalam pemahaman dan mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan.

Penelitian tentang peran gender pada politik telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penulis akan membahas mengenai keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peran perempuan terhadap politik di Kabupaten Lumajang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan negatif keterlibatan perempuan dalam bidang politik khususnya di Kabupaten Lumajang.



Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keterlibatan perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Lumajang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003), yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tabel penjaring data dan wawancara. Berikut adalah instrument tabel penjaring data.

FRAGSI	LEGISLATIF	KOMISI

Intrumen wawancara

1. Apa tujuan anda ingin menjadi anggota legislatif di DPRD Kupaten lumajang?
2. Apa yang mendasari anda terjun di dunia politik?
3. Bagaimana tanggapan keluarga, ketika anda terjun di dunia politik?
4. Menurut anda, apakah perempuan perlu terjun ke dalam politik?
5. Bagaimana kesan anda selama menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lumajang?

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel, dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara *display data* dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil inti sarinya saja.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, pada Pemilu 2019, dari total 7.968 calon legislatif yang diusung oleh 16 partai politik, hanya 3.262 calon atau sekitar 40,95% adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20% perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, sehingga bisa diasumsikan bahwa banyak perempuan yang kalah dalam pemilihan tersebut.

Pada Pemilu 2019, di Kabupaten Lumajang terdapat 12 kursi DPRD Kabupaten yang diperebutkan, dan terdapat 3 partai politik yang berhasil meraih kursi, yaitu PDI-P, PKB, dan Gerindra. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa dari total 131 calon legislatif yang diusung oleh ketiga partai tersebut, hanya sekitar 30% yang merupakan calon perempuan.

Meskipun demikian, keberadaan calon legislatif perempuan di Kabupaten Lumajang maupun di daerah lainnya merupakan sebuah langkah penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik dan pembangunan daerah. Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam politik, diharapkan kepentingan perempuan dan isu-isu gender dapat lebih diperhatikan dan diwakili dalam pembuatan kebijakan.

Keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang terlihat pada beberapa fraksi. Fraksi tersebut diantaranya, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. Adapun pada Fraksi PKB terdapat 2 orang legislatif perempuan. Pada fraksi Gerindra, Demokrat, dan PKS hanya terdapat satu legislatif perempuan.

Legislatif perempuan pada beberapa fraksi tersebut di atas, menempati beberapa komisi di DPRD Kabupaten Lumajang. Terdapat empat komisi pada DPRD Kabupaten lumajang. Komisi tersebut diantaranya, Komisi A: Komisi Pemerintahan, Hukum dan Keamanan. Komisi ini bertanggung jawab untuk membahas berbagai hal terkait dengan pemerintahan daerah, hukum, dan keamanan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, serta tindak pidana di wilayah Kabupaten Lumajang.

Komisi B: Komisi Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan. Komisi ini bertanggung jawab untuk membahas berbagai hal terkait dengan perencanaan dan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta pengelolaan keuangan daerah.

Komisi C: Komisi Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan Hidup, Pendidikan, dan Kebudayaan. Komisi ini bertanggung jawab untuk membahas berbagai hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, pendidikan, dan kebudayaan, seperti program-program kesejahteraan masyarakat, upaya perlindungan lingkungan hidup, dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lumajang.

Komisi D: Komisi Infrastruktur, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Komisi ini bertanggung jawab untuk membahas berbagai hal terkait dengan pembangunan infrastruktur dan sumber daya mineral, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral di wilayah Kabupaten Lumajang.

Adapun sebaran komisi yang diduduki oleh legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

FRAGSI	LEGISLATIF	KOMISI
PKB	LPKB-1	D
	LPKB-2	B
GERINDRA	LGER	A
DEMOKRAT	LDEM	B
PKS	LPKS	A

Keterlibatan Perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang

Menilik dari temuan di atas, anggota legislatif perempuan di Kabupaten Lumajang menempati tiga komisi. Adapun komisi tersebut adalah, Komisi A, B, dan D. Komisi A merupakan komisi yang menangani Pemerintahan, Hukum dan Keamanan. Terdapat dua anggota legislatif perempuan yang tersebar di komisi tersebut, yaitu dari fraksi Gerindra (LGER) dan komisi PKS (LPKS).

Salah satu tugas komisi A tampak pada kasus pemberhentian Kepala Desa di Rowokangkung tahun 2020. Hal tersebut dikuatkan pada berita di portal website DPRD Kabupaten Lumajang. Anggota legislatif (LGER) menegaskan “Pemberhentian Kades situ butuh kalian yang mendalam. Harus cek data dulu kebenarannya. Jika memang terbukti bersalah. Ya harus diberhentikan”.

Paparan di atas dapat dikatakan bahwa, perempuan mampu bertanggung jawab dan memberikan keputusan. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

*“Menurut saya, perempuan harus bisa dan mampu untuk terjun di kancah perpolitikan. Jangan hanya terkungkung di rumah dan malu untuk menyuarakan aspirasi. Kita semua sama, perempuan maupun laki-laki”
(LPKS). (Pada tanggal 14 Desember 2022).*

Selain itu, komisi D kabupaten Lumajang juga mengikuti dan ikut bersinergi dalam kegiatan MTQ ke XXX di Kabupaten Lumajang. Adapun pada komisi D tersebut terdapat satu anggota legislatif perempuan (LPKB1). Pada kinerja komisi B juga tampak pada pembangunan-pembangunan di Kabupaten Lumajang. Selain itu, komisi B juga rutin melakukan sidak ke toko dan swalayan untuk pengecekan makanan kadaluarsa.

Pada paparan di atas dapat dikatakan bahwa, tugas-tugas pada komisi-komisi di DPRD Kabupaten Lumajang beragam. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa peran perempuan pada setiap komisi sangat diperlukan. Perempuan-perempuan anggota legislatif di Kabupaten Lumajang menjadikan warna dan *spirit* dalam dunia perpolitikan.

Perempuan dan Politik

Hak perempuan untuk menjadi pemimpin adalah sebuah isu penting dalam gerakan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Seiring dengan perjuangan untuk memperoleh hak politik, perempuan juga memperjuangkan hak untuk memimpin di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, akademis, dan sosial.

Namun, meskipun sudah ada peningkatan dalam keterwakilan perempuan di bidang-bidang tersebut, perempuan seringkali masih mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam memperoleh posisi kepemimpinan yang setara dengan pria. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain stereotip gender, perbedaan gaji, kurangnya akses ke pendanaan dan dukungan, serta kesulitan memadukan tanggung jawab keluarga dengan karier.

Hal tersebut juga dirasakan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang. Misalnya faktor keluarga, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Sebagian keluarga mendukung saya untuk berpolitik. Namun, ada beberapa orang (anggota keluarga) yang masih ragu waktu awal-awal saya mau nyaleg. Mungkin mereka berpikiran ‘ngapain sih perempuan kerja mati-matian ngurusin rakyat’ gitu ya kasarannya. Tapi mau bagaimana lagi, karena hati saya terpenggil, ya saya beri pengertian”. (LPKS) (Pada tanggal 14 Desember 2022).

Stereotip gender ada di banyak budaya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat harapan dan norma tertentu tentang bagaimana pria dan wanita seharusnya berperilaku dan peran apa yang harus mereka isi.

Beberapa stereotip gender umum di Indonesia mencakup kepercayaan bahwa wanita seharusnya memprioritaskan keluarga dan tugas domestik mereka daripada mengejar karier, sementara pria seharusnya menjadi pencari nafkah dan menyediakan untuk keluarga mereka. Ada juga kepercayaan umum bahwa wanita seharusnya sopan, lembut, dan patuh, sementara pria seharusnya kuat dan tegas.

Stereotip gender yang dirasakan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang sama dengan perempuan-perempuan kebanyakan. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut.

“Kita sebagai perempuan harusnya tidak perluberkecil hati. Jangan hiraukan omongan-omongan masyarakat. Mungkin banyak dari masyarakat yang meragukan kinerja perempuan, terutama dibidang politik. Perempuan dianggap tidak mampu dan tidak cakap dalam memimpin. Tapi, tidak semua perempuan seperti itu. Ada yang memang dari lubuk hatinya dia ingin menjadi seorang pemimpin, dia cakap, dia mampu, tapi penerimaan masyarakat saja yang kurang”. (LGER). (5 Desember 2022).

Dari pernyataan (LGER) tersebut, ketertarikan perempuan pada politik adalah muncul dari hati. Meskipun demikian masih banyak pula perempuan-perempuan yang terjun ke dunia politik karena dipaksa oleh keadaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan (LDEM) berikut ini.

“Awalnya saya tidak begitu tertarik dengan dunia politik. Tapi, ada di suatu masa Ketika saya melihat aspirasi-aspirasi masyarakat yang masih belum tersampaikan, infrastruktur yang belum memadai, macam-macam lah.

Akhirnya timbul rasa ‘ini kemana aja pemerintah? Hal sepele ini saja tidak bisa ditangani’. Akhirnya saya nyaleg”. (5 Desember 2002).

Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas, bisa digambarkan bahwa hak-hak perempuan belum sepenuhnya diindahkan. Masih banyak anggapan negatif masyarakat tentang perempuan yang terjun di dunia politik.

Kesimpulan

Keterlibatan perempuan di dunia politik masih menghadapi banyak hambatan dalam dunia politik. Walaupun sudah ada banyak kemajuan dan perubahan positif dalam beberapa dekade terakhir, namun perempuan masih kurang diwakilkan dalam posisi-posisi politik dan terkadang mengalami diskriminasi dan seksisme dalam lingkungan politik. Hal tersebut tampak pada jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang. Hanya terdapat lima anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang.

Namun, perempuan telah menunjukkan kemampuan dan kualitas kepemimpinan yang sama dengan pria dalam banyak kesempatan. Ketika diberikan kesempatan yang sama, perempuan mampu menghasilkan perubahan positif dan menghadirkan suara baru dalam politik. Hal ini tercermin pada keterlibatan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten lumajang dalam kinerjanya untuk masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa komisi yang melibatkan perempuan dalam kinerjanya. **Ucapan Terima Kasih** (opsional)

Referensi

- Abdullah Kh. (2004). Gender and business performance of ... Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bank Indonesia. (2016).
- Glasberg, D.S & Shannon, D. (2011). Political sociology. United States: SAGE Publications, Inc
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset Bandung.
- Paramita, Patricia Dhiana. 2011. Keterkaitan Antara Politik dan Kekuasaan dalam Organisasi. Bandung:PT refika Adhitama.
- Sukarno, Bedjo. 2016. Pendidikan Politik dalam Konteks Demokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.